

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

(Krisis ekonomi tahun 1997/1998, telah memberikan pelajaran yang sangat mahal dan berharga bagi bangsa Indonesia). Situasi ini telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan pada masa silam ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan adanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan telah menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan. Salah satu isu yang hingga saat ini menjadi masalah bagi pemerintah yang belum terselesaikan adalah kemiskinan. (Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan mendefenisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat).

Selain itu kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan jugamemiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti

kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan ini.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Pada perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan akan turun sebanyak 4,6 juta orang. Laporan bank dunia mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 mencapai 105,3 juta atau 45,2 persen dari jumlah penduduk dan diproyeksikan jumlah penduduk miskin menjadi 100,7 juta orang atau 42,6 persen pada tahun 2008 (*Koran Republika 16 November 2007*). Namun keadaan ini belum mempertimbangkan pertumbuhan, inflasi, serta dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2008, asumsi yang dipakai Bank Dunia adalah pertumbuhan ekonomi 6,4%, inflasi 5%, defisit anggaran 1,8% dan harga rata-rata minyak dunia 72,4 dolar AS per barel. Sehingga jumlah angka kemiskinan yang dilaporkan oleh bank dunia mungkin sudah jauh dari kondisi jumlah keluarga miskin yang sebenarnya.

Media Indonesia dalam tulisan tentang kemiskinan (22 Oktober 2007) mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul "*The New Indonesia Work for the poor*" yang menyatakan meski telah mengalami peningkatan yang pesat dalam pertumbuhan ekonomi, hampir separuh penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini terus

terjadi saat krisis ekonomi menghantam Indonesia. Banyak penduduk terperangkap kemiskinan secara turun temurun. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan pendidikan dengan baik untuk anak-anaknya sehingga generasi berikutnya tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pada perkembangannya, di satu sisi pemerintahannya Indonesia terus berkomitmen untuk menempatkan pembangunan manusia dalam mengentaskan kemiskinan sebagai fokus utama dari strategi membangun kesejahteraan rakyat. Komitmen ini telah dituangkan dalam agenda konstitusional sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam proses pembangunan diantaranya dalam tingkat nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 45/amandemen sebagai landasan idil dan konstitusional untuk penanggulangan kemiskinan, selain itu upaya pengarusutamaan penanggulan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Sehingga kebijakan RPJM 2004-2009 diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)/*National Strategy for Poverty Reduction* yang telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Strategi dan kebijakan dirumuskan dalam dokumen SNPK yang dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas antar pelaku baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi,

lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional; serta dilengkapi tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, sekitar 60 persen pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos (Bantuan Sosial).

Program-program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Penelitian cepat ini memperlihatkan bahwa Bantuan Sosial Tunai dapat memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat selama 2-3 minggu dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan, kesehatan, dan membayar hutang. Responden menyatakan bahwa

bantuan sosial dengan bentuk uang tunai lebih disukai dibandingkan dengan bantuan sosial berbentuk barang atau sembako. Pasca Bantuan Sosial Tunai, responden berharap adanya program-program lanjutan dari pemerintah, antara lain berupa modal dan rintisan usaha (44,59%), serta bantuan sosial lanjutan (29,54%).

Dari sisi implementasi program, dapat dilihat bahwa informasi penerimaan Bantuan Sosial Tunai sebagian besar berasal dari RT/RW dan aparat Desa/kelurahan setempat. Disamping itu penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia sebagian besar diambil oleh penerimanya di Kantor Pos sebagian besar responden penerima BST (86,49%) menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial lain dan merasa layak menerima (97,92%) serta rela berbagi bantuan (63,16%) dengan mereka yang tidak menerima.

Komitmen ini akan ditandai oleh produktifitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian Kota Malang. Namun dari pertumbuhan perekonomian tersebut, dijelaskan juga bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Malang tidak dapat dikesampingkan, Kota Malang dengan 33 Kecamatan disebutkan masih memiliki KK miskin yang masih sangat banyak dan salah satunya itu adalah Kecamatan Sukun Kelurahan Bandulan, sehingga Berdasarkan kasus-kasus di atas, pemerintah sebaiknya berpikir ulang untuk meneruskan program penanggulangan kemiskinan. Ukuran keberhasilan yang dipakai oleh pemerintah sebagai pertimbangan harus mampu merubah standar kehidupan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu kita ketahui bersama pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang salah satunya yaitu program Bantuan Sosial Tunai di Indonesia khususnya di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bandul dalam program penanganan kemiskinan tersebut secara global dan

lokal sebagai komitmen negara dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana program Bantuan Sosial Tunai ini sudah berjalan di Indonesia khususnya di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bandulan dengan menyoroti proses mekanisme dalam mengimplementasikan tujuan dan target dari program penanganan kemiskinan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk mencapai kerangka tujuan masyarakat yang sejahtera. Atas dasar uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian yakni ; Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang.?
2. Faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, merupakan tahap agar dapat berlatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan keterampilan menuliskan dalam bentuk karya tulis yang berpedoman pada kajian dan teori yang didapat dari ilmu administrasi publik.
2. Secara Praktis, dengan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang belum bisa melaksanakan prinsip *good governance* ini.